

Modul 1

Dasar Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana



Modul Pelatihan Fasilitator
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan
Kegiatan Penguatan Masyarakat Serupa

EDISI VII 2018



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

MODUL 1 DASAR PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Modul ini membahas pengertian, konsep dan konteks bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia serta komitmen-komitmen global berkaitan dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

**Modul Pelatihan Fasilitator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Dan Kegiatan Penguatan Masyarakat Serupa**

Modul 1. Dasar Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

EDISI VII 2018

Pengarah

B. Wisnu Widjaja – BNPB

Penanggungjawab

Lilik Kurniawan – BNPB

Pangarso Suryotomo – BNPB

Penyunting

Eko Teguh Paripurno – Pusat Studi Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta

Penyusun

Sigit Purwanto – PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta

Yugyasmono – Perkumpulan Lingkar

Sumino – LPTP Solo

Wahyu Heniwati – Daya Annisa

Indra Baskoro Adi – PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta

Henricus Hari Wantoro – Desa Lestari

Arnice Adjawaila – Yakkum Emergency Unit

Anggoro Budi Prasetyo – Perkumpulan Aksara

2018

KATA SAMBUTAN

*“Datanglah kepada Rakyat,
hiduplah bersama mereka,
mulailah dengan apa yang mereka tahu,
bangunlah dari apa yang mereka punya,
tetapi Pendamping yang baik adalah
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,
Rakyat berkata, “Kami sendirilah yang mengerjakannya.”*
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filusuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai *superhero* yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar *output* tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk *Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)* ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi obyek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisa, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu modul dan/atau panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan modul fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antarpihak. Hasil paduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Modul ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (*best practice*), untuk itu diharapkan dengan adanya modul ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan – BNPB

Ir. Bernardus Wisnu Widjaya, M.Sc

SEKAPUR SIRIH

Menjawab kebutuhan sebagai upaya pengurangan risiko bencana, khususnya berbasis komunitas secara lebih komprehensif dan terintegrasi dengan pembangunan, BAPPENAS-UNDP mencoba menggagas pemaduan upaya PRBBK ke dalam pembangunan di tingkat desa. Rintisan melalui kegiatan “Pengembangan Model Desa Tangguh” pada tahun 2008 tersebut menghasilkan gambaran pelaksanaan PRBBK yang lebih komprehensif mungkin dilakukan. Upaya ini dilanjutkan dan dimatangkan dalam kegiatan “PRBBK – Desa Tangguh” dalam program kerjasama BNPB, BAPPENAS dan UNDP pada tahun 2009-2011. Kegiatan Desa Tangguh tersebut menjadi salah satu alternatif bentuk PRBBK. Inisiatif didukung BNPB melalui Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana).

Penyelenggaraan program pengembangan Destana memiliki empat landasan: i) landasan empiris-faktual bencana yang menunjukkan realitas ancaman di Indonesia, ii) landasan filosofi kearifan lokal yang menunjukkan akar sosial-budaya dari pengurangan risiko bencana, iii) pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting, dan iv) otonomi desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dirinya sendiri termasuk dalam hal pengurangan risiko bencana.

Upaya-upaya membangun masyarakat tangguh yang mampu beradaptasi dan berkembang berhadapan dengan risiko bencana menjadi sebuah keniscayaan. Kemampuan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan sistem sosial-budaya masyarakat mengorganisir diri untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Oleh karena itu praktik rekayasa sosial-budaya untuk pengurangan risiko bencana penting untuk dilakukan.

Program Destana mulai diselenggarakan pada tahun 2013 di berbagai daerah melalui kerjasama BNPB - BPBD. Ketiadaan modul yang memadai untuk memandu Fasilitator Destana saat itu, mendorong disusunnya modul bagi fasilitator ini. Modul ini adalah hasil memadukan pengalaman dan praktik penyelenggaraan Destana dan pengembangan ketangguhan masyarakat di berbagai wilayah oleh banyak lembaga/organisasi; pemerintah, organisasi non-pemerintah/LSM maupun individu. Dilengkapi dengan praktik-praktik fasilitasi desa tangguh maupun PRBBK, modul ini terbit pertamakali di tahun 2015 dan terus dikembangkan-sempurnakan hingga edisi ini.

Akhirnya, sebagai buah perenungan berbagai individu dari berbagai lembaga yang bersatu-padu, bergotong royong, Penyusun menyadari masih banyak kekurangan. Dengan demikian, hadirnya modul ini dapat menjadi ruang dan bahan bagi pengembangan modul Fasilitator Destana di kemudian hari.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	2
SEKAPUR SIRIH	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL DAN LEMBAR KERJA	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	8
PETA KEDUDUKAN MODUL.....	9
BAGIAN I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Tujuan Pembelajaran	10
C. Ruang Lingkup dan Pengorganisasian Pembelajaran	10
C.1.Ruang lingkup	10
C.2.Pengorganisasian pembelajaran.....	10
BAGIAN II KEGIATAN PEMBELAJARAN	12
A. Pengantar	12
B. Tujuan Pembelajaran	12
C. Indikator Pencapaian Tujuan.....	12
D. Uraian Materi.....	12
D.1. Konsep dan konteks bencana di Indonesia	12
D.2. Penyelenggaraan PB Indonesia	14
D.3. Komitmen PRB Global	15
E. Kegiatan Pembelajaran.....	20

E.1. Curah pendapat dan tugas kelompok tentang pengertian, konsep dan konteks bencana di Indonesia	20
E.2. Curah pendapat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia	21
E.3. Tugas kelompok tentang kebijakan PB/PRB global.....	21
BAGIAN III PENUTUP	25
A. Latihan/Kasus/Tugas	25
B. Umpan Balik	25
C. Refleksi dan Tindak Lanjut.....	26
D. Kunci Jawaban.....	27
Daftar Pustaka.....	28
Tim Penyusun.....	29
Evaluasi dari Pengguna	33
Saran dan Masukan.....	34

DAFTAR TABEL DAN LEMBAR KERJA

Tabel 1.1. Kegiatan Pembelajaran dan Alokasi Waktu	11
Tabel 2.1. Jenis dan ragam ancaman	13
Lembar kerja 1. Curah pendapat penyelenggaraan PB Indonesia	21
Lembar kerja 2. Tugas kelompok pelaksanaan Kesepakatan Paris di desa/kelurahan	21
Lembar kerja 3. Tugas kelompok tujuan pembangunan berkelanjutan desa/kelurahan.....	22
Lembar Kerja 4. Tugas kelompok pelaksanaan kerangka kerja Sendai di desa/kelurahan	24
Tabel. 3.1. Penilaian latihan	26
Tabel 3.2. Refleksi dan tindak lanjut	26

DAFTAR GAMBAR

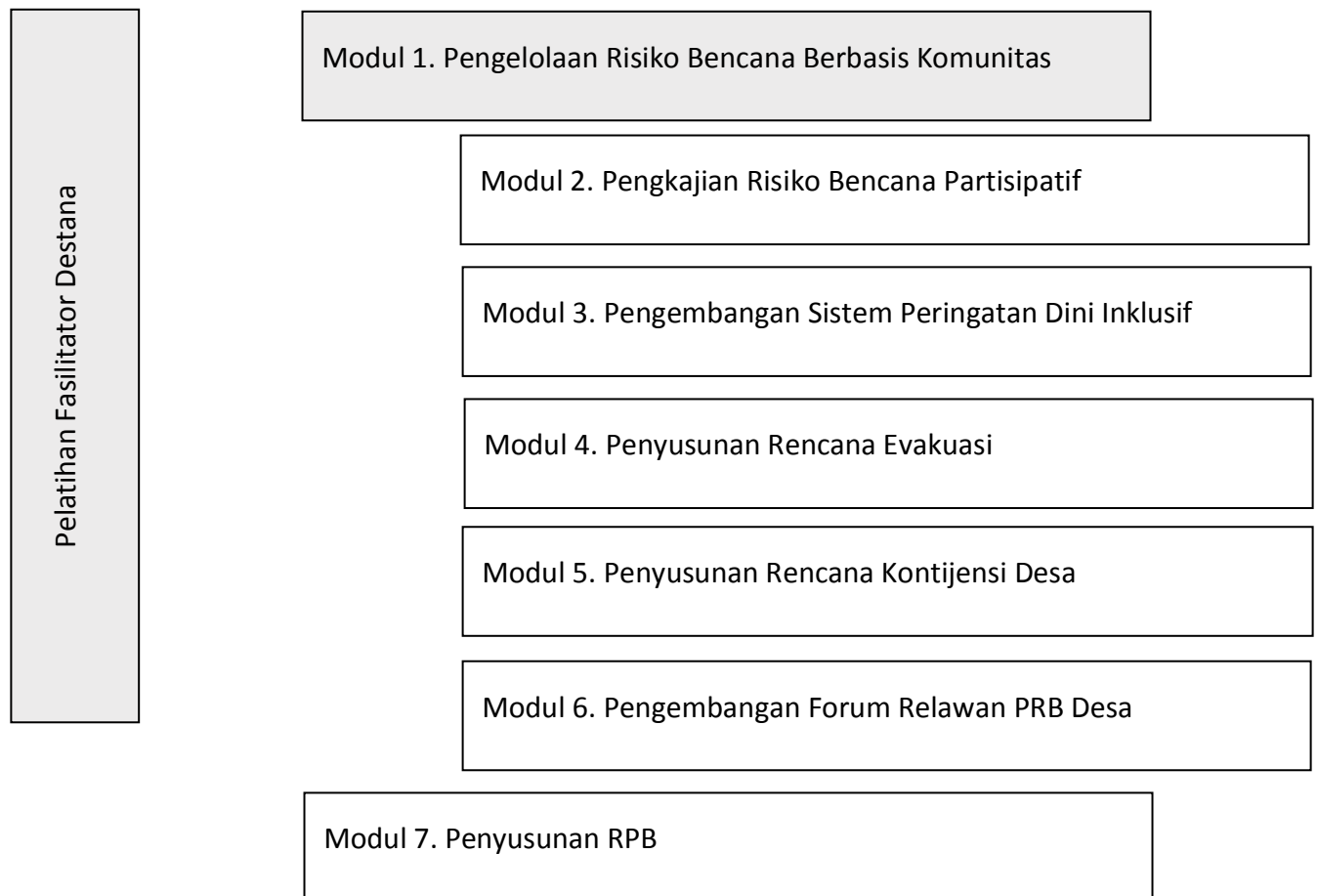
Gambar 2.1. Siklus tahapan penanggulangan bencana	14
Gambar 2.2. Ikon tujuan pembangunan berkelanjutan	17
Gambar 2.3. Target SFDRR	19
Gambar 2.4. Prioritas aksi SFDRR.....	20

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Modul 1. Dasar PB-PRB ini membahas tentang konsep dasar dan konteks bencana di Indonesia, penyelenggaraan PB Indonesia dan komitmen PRB global .
2. Modul ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni: (1) Pendahuluan, (2) Kegiatan Pembelajaran dan (3) Penutup.
3. Modul ini menjadi landasan untuk membahas modul 2 hingga modul 7.
4. Kebutuhan waktu untuk mempelajari modul ini secara menyeluruh diperkirakan 4 Jam Pembelajaran (JPL) atau dapat dibagi menjadi beberapa tahap pembelajaran sesuai ketersediaan waktu.
5. Untuk melakukan kegiatan pembelajaran utuh dan menyeluruh, disarankan memulainya dengan dengan membaca serta memahami petunjuk dan pengantar modul ini, mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran secara sistematis dan mengerjakan kegiatan pembelajaran pada Lembar Kerja (LK).
6. Selama kegiatan pembelajaran akan dilakukan penilaian berbasis kelas oleh fasilitator.
7. Pada akhir kegiatan pembelajaran peserta akan diinstruksikan untuk mengerjakan latihan soal dan penugasan lainnya.
8. Peserta disarankan membaca sumber-sumber relevan lain untuk melengkapi pemahaman.
9. Setelah mempelajari modul ini, peserta dapat menerapkan hasil belajar dalam pelaksanaan program atau kegiatan meningkatkan ketangguhan masyarakat di daerah masing-masing.

PETA KEDUDUKAN MODUL

Pelatihan Fasilitator Destana dilengkapi dengan modul 1 hingga modul 7. Saat ini kita sedang membahas Modul 1. Dasar PB-PRB.



BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan bencana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari komitmen-komitmen global. Keprihatinan masyarakat dunia terhadap dampak bencana telah melahirkan keputusan-keputusan bersama untuk bertindak bersama mengurangi dampak bencana. Negara-negara penandatangan komitmen kemudian menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan menjadi tindakan tingkat nasional sesuai konsep dan konteks masing-masing.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Modul 1. Dasar PB/PRB, diharapkan peserta mampu memahami dan menjelaskan dasar PB dan PRB. Indikator capaian pembelajaran modul ini dirincikan sebagai berikut:

1. Peserta memahami konsep dan konteks bencana di Indonesia
2. Peserta memahami penyelenggaraan PB Indonesia
3. Peserta memahami komitmen-komitmen global PRB

C. Ruang Lingkup dan Pengorganisasian Pembelajaran

C.1. Ruang lingkup

Ruang lingkup modul ini meliputi pembahasan pokok materi tentang 1) konsep dan konteks bencana di Indonesia, 2) Penyelenggaraan PB Indonesia, 3) komitmen PRB Global. Setiap pokok materi dibahas secara terperinci dan berurutan pada bagian kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran meliputi ceramah, tanya jawab, curah pendapat, diskusi kelompok dan presentasi.

C.2. Pengorganisasian pembelajaran

Dalam proses pembelajaran modul ini peserta akan melakukan kegiatan secara individu dan kelompok berupa mempelajari, menyimak, menjawab pertanyaan, mencurahkan pendapat, dan mengerjakan tugas tentang pengembangan sistem peringatan dini di masyarakat.

Aktivitas pembelajaran dan alokasi waktu dalam modul ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Kegiatan Pembelajaran dan Alokasi Waktu

No	Kegiatan	Waktu (Menit)
1.	Menjelaskan, curah pendapat dan tugas kelompok tentang pengertian, konsep dan konteks bencana di Indonesia	90
2.	Menjelaskan dan curah pendapat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia	45
3.	Menjelaskan dan tugas kelompok tentang kebijakan PB/PRB global	45

BAGIAN II KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Pengantar

Dalam proses pembelajaran, peserta secara bersama melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan metode curah pendapat, diskusi, presentasi dan praktek secara individu maupun kelompok. Pada akhir pembelajaran peserta akan diminta menyusun rencana fasilitasi untuk diterapkan di tempat tugas masing-masing.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Modul 1. Dasar PB dan PRB, diharapkan peserta mampu memahami menjelaskan, mensintesis dan menerapkan pengetahuan dasar PB dan PRB.

C. Indikator Pencapaian Tujuan

Indikator capaian pembelajaran modul ini dirincikan sebagai berikut:

1. Peserta mampu menjelaskan dan menganalisis pengertian bencana, ragam bencana dan jenis ancaman
2. Peserta mampu menunjukkan hasil analisis tahapan dan kegiatan penyelenggaraan PB Indonesia
3. Peserta mampu menunjukkan hasil analisis komitmen-komitmen PRB global

D. Uraian Materi

D.1. Konsep dan konteks bencana di Indonesia

1. Pengertian bencana di Indonesia

Pasal 1 ayat 1 UU 24/2007 menjelaskan: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Jenis bencana di Indonesia

Pasal 1 ayat 2, 3 dan 4 UU 24/2007 menjelaskan:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror

3. Jenis ancaman

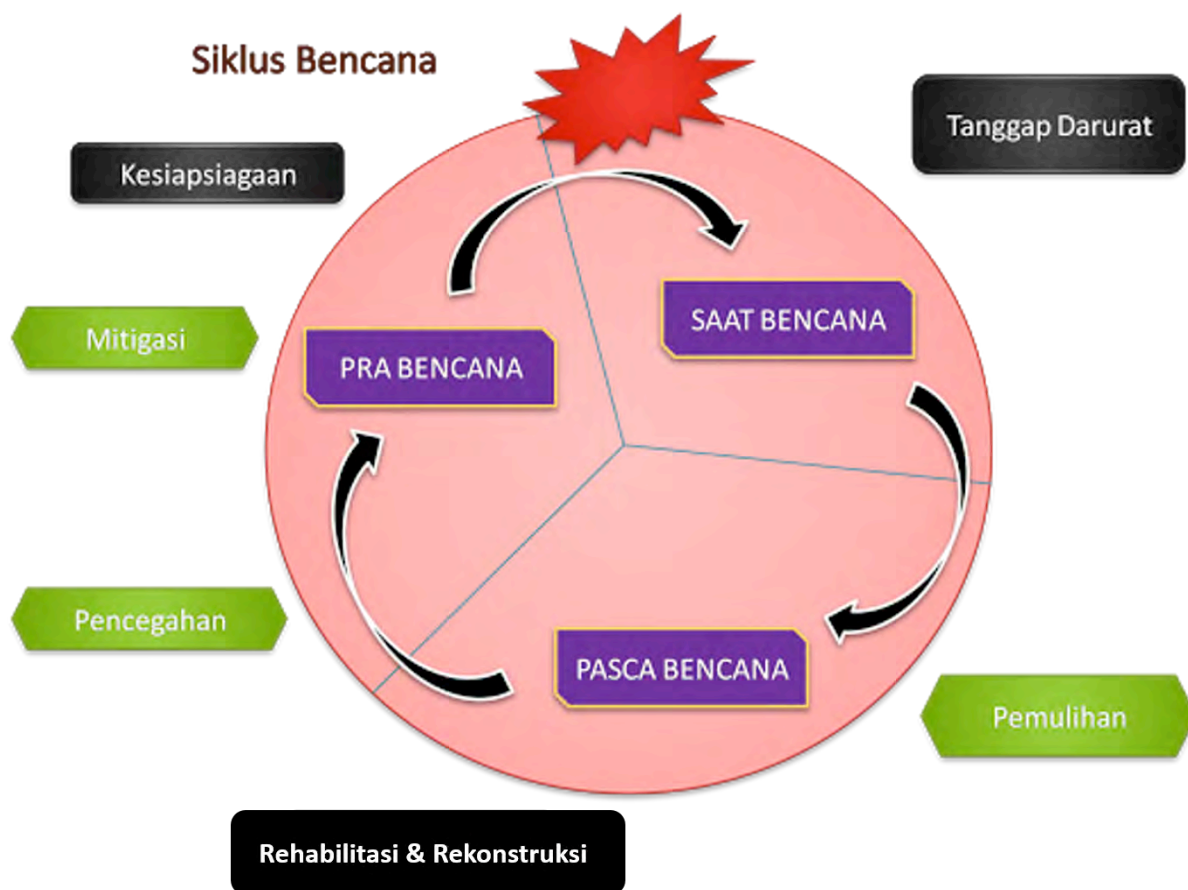
Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (Psl 1 ayat 13 UUPB). Ancaman dapat berupa kejadian alamiah, hasil samping kegiatan manusia atau gabungan keduanya. Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunungapi, tsunami, wabah, hama, banjir dan longsor. Ancaman akibat hasil samping kegiatan manusia meliputi konflik sosial, pencemaran, kegagalan teknologi dan kecelakaan transportasi. Ancaman seperti banjir, longsor, wabah, hama, dan kecelakaan transportasi juga sering diartikan sebagai kombinasi antara peristiwa alamiah dan kesalahan manusia.

Tabel 2.1. Jenis dan ragam ancaman

Jenis Ancaman	Ragam Ancaman
<i>Ancaman geologi</i>	<i>Gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah</i>
<i>Ancaman Hidro-meterorologi</i>	<i>Banjir, topan, banjir bandang, kekeringan</i>
<i>Ancaman biologi</i>	<i>Wabah, hama/penyakit tanaman, penyakit hewan</i>
<i>Ancaman kegagalan teknologi</i>	<i>Kecelakaan transportasi, pencemaran industri</i>
<i>Ancaman lingkungan</i>	<i>Kebakaran, kebakaran hutan, penggundulan hutan.</i>
<i>Ancaman sosial</i>	<i>Konflik, terrorisme</i>

D.2. Penyelenggaraan PB Indonesia

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (Pasal 1, ayat 5, UU No 24/2007).



Gambar 2.1. Siklus tahapan penanggulangan bencana

- 1) Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 2) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 3) Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

- 4) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 5) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 6) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- 7) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana



D.3. Komitmen PRB Global

1. Kesepakatan Paris (Paris Agreement)

Persetujuan Paris adalah persetujuan dalam kerangka UNFCCC yang mengawal reduksi emisi karbon dioksida efektif berlaku sejak tahun 2020. Persetujuan ini dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 di Paris.

Tujuan kesepakatan Paris

- (a) Menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim.
- (b) Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan.
- (c) Membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

2. Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPD) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.



Gambar 2.2. Ikon tujuan pembangunan berkelanjutan

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun [7 target]
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan [8 target]
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia [13 target]
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang [10 target]
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan [9 target]
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang [8 target]
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan dan modern bagi semua orang [5 target]

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang [11 target]
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi [8 target]
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara [10 target]
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan [10 target]
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan [11 target]
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya [5 target]
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan [10 target]
15. Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati [12 target]
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan [12 target]
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan [19 target]

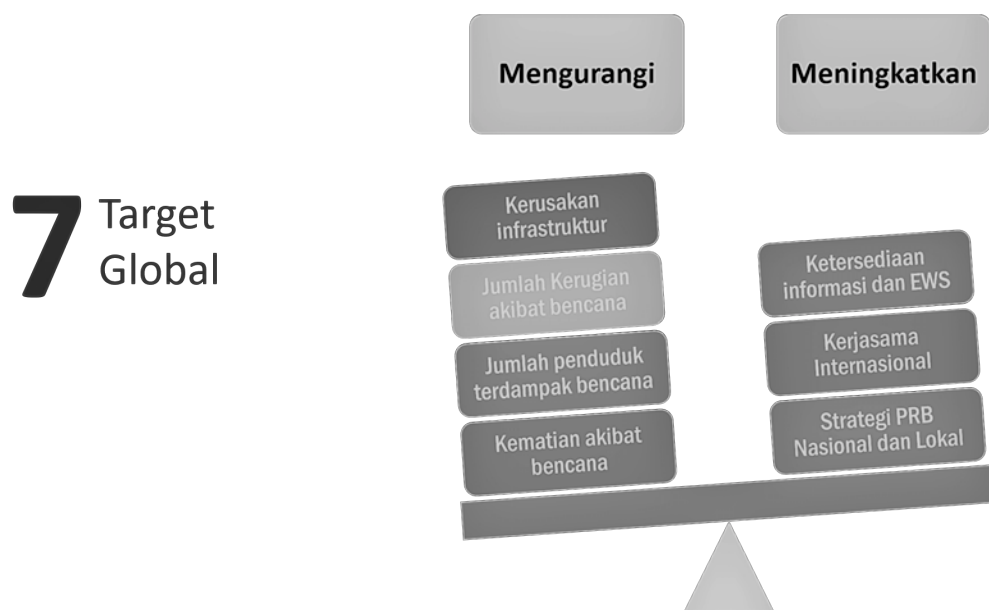
Komitmen Indonesia tercermin dalam 20 prioritas pembangunan nasional. Di bawah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dengan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan, Indonesia memulai upaya-upaya intensif untuk mengintegrasikan SDGs lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesinambungan dan konsisten dengan konteks setempat.

1. Pembangunan Manusia, 2. Pertumbuhan Ekonomi, 3. Kependudukan & KB, 4. Pendidikan, 5. Kesehatan, 6. Gender, 7. Perlindungan Anak, 8. Pangan & Nutrisi, 9. Energi, 10. Maritim,

11. Infrastruktur, 12. Air & Sanitasi, 13. Lingkungan Hidup, 14. Ketidaksetaraan, 15. Pembangunan Perkotaan & Pedesaan, 16. Tata Kelola Pemerintahan, 17. Politik & Demokrasi, 18. Keamanan & Pertahanan, 19. Kemiskinan, dan 20. Kemitraan Global.

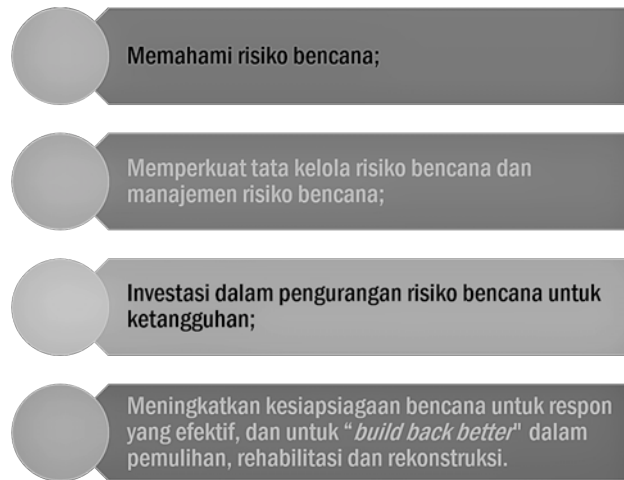
3. Kerangka aksi Sendai untuk pengurangan risiko bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction)

Kerangka Kerja Sendai juga merupakan kesepakatan dunia untuk mengurangi risiko bencana. Kesepakatan Sendai ini hasil dari Konferensi PBB tentang pengurangan risiko bencana yang diselenggarakan pada 14 hingga 18 Maret 2015 di kota Sendai, Provinsi Miyagi, Jepang. Indonesia menjadi salah satu negara penandatangan kesepakatan ini. Apa saja inti kesepakatan Sendai ini?



Gambar 2.3. Target SFDRR

4 Prioritas Aksi



Gambar 2.4. Priotitas aksi SFDRR

E. Kegiatan Pembelajaran

E.1. Curah pendapat dan tugas kelompok tentang pengertian, konsep dan konteks bencana di Indonesia

Setelah mengikuti penjelasan tentang kosep dan konteks bencana di Indonesia, peserta diminta membentuk kelompok dengan anggota 3 sampai 4 orang dan melakukan curah pendapat tentang pengertian bencana dan jenis bencana di Indonesia. Hasil curah pendapat dituliskan dalam tabel menggunakan lembar kerja 1 di bawah ini.

Lembar kerja 1. Curah pendapat kelompok pengertian dan jenis bencana di Indonesia

Pertanyaan?	Uraian Jawaban?
Apa pengertian bencana menurut kelompok Anda?	
Apa pengertian jenis bencana alam menurut kelompok Anda?	
Apa pengertian jenis bencana non alam menurut kelompok Anda?	
Apa pengertian jenis bencana sosial menurut kelompok Anda?	

E.2. Curah pendapat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia

Setelah mengikuti penjelasan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, peserta diminta kembali ke kelompoknya dan melakukan curah pendapat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Hasil curah pendapat dituliskan dalam tabel menggunakan lembar kerja 2 di bawah ini.

Lembar kerja 1. Curah pendapat penyelenggaraan PB Indonesia

Tahapan Penyelenggaraan PB	Apa Bentuk Kegiatannya?
Kesiapsiagaan	
Tanggap darurat	
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

E.3. Tugas kelompok tentang kebijakan PB/PRB global








Setelah mengikuti uraian materi tentang kebijakan PB-PRB Global, peserta diminta kembali ke kelompoknya dan melakukan curah pendapat tentang pelaksanaan Paris Agreement, Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals's) dan Kerangka aksi Sendai untuk pengurangan risiko bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) menggunakan lembar kerja 3, 4, dan 5 di bawah ini.










Lembar kerja 2. Tugas kelompok pelaksanaan Kesepakatan Paris di desa/kelurahan


Isi Kesepakatan Paris	Bentuk Kegiatan Pelaksanaan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Saja Pelakunya
1. Menahan laju peningkatan temperatur global		
2. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim		
3. Membuat suplai finansial yang konsisten demi		

Isi Kesepakatan Paris	Bentuk Kegiatan Pelaksanaan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Saja Pelakunya
tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.		

Lembar kerja 3. Tugas kelompok tujuan pembangunan berkelanjutan desa/kelurahan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bentuk Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Pelakunya?
		
		
		
		
		
		
		

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bentuk Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Pelakunya?
 <p>8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</p>		
 <p>9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR</p>		
 <p>10 BERKURANGNYA KESEJANGAN</p>		
 <p>11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN</p>		
 <p>12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB</p>		
 <p>13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</p>		
 <p>14 EKOSISTEM LAUTAN</p>		
 <p>15 EKOSISTEM DARATAN</p>		
 <p>16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBARAN YANG TANGGUH</p>		

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bentuk Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Pelakunya?
		

Lembar Kerja 4. Tugas kelompok pelaksanaan kerangka kerja Sendai di desa/kelurahan

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Bentuk Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Pelakunya?
1. Memahami risiko bencana		
2. Memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana		
3. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan		
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi		

BAGIAN III PENUTUP

A. Latihan/Kasus/Tugas

1. Tahapan penanggulangan bencana Indonesia
 - a. Rehabilitasi-Rekonstruksi-Kesiapsiagaan
 - b. Kesiapsiagaan-Tanggap Darurat-Pemulihan
 - c. Pemulihan-Tanggap Darurat-Kesiapsiagaan
 - d. Tanggap Darurat-Kesiapsiagaan-Pemulihan
2. Jenis bencana di Indonesia adalah
 - a. Bencana alam
 - b. Bencana non alam
 - c. Bencana sosial
 - d. Semua (a, b, c) benar
3. Gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api termasuk jenis ancaman
 - a. Geologi
 - b. Hidrometeorologi
 - c. Alam
 - d. Kerusakan lingkungan
4. Banjir, angin puting beliung dan kekeringan termasuk jenis ancaman
 - a. Geologi
 - b. Hidrometeorologi
 - c. Alam
 - d. Kerusakan lingkungan
5. Berapa jumlah prioritas aksi Sendai
 - a. 9
 - b. 17
 - c. 4
 - d. 10
6. Berapa jumlah indikator tujuan pembangunan berkelanjutan
 - a. 9
 - b. 17
 - c. 4
 - d. 10

B. Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban peserta dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban peserta yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta terhadap modul ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Tabel. 3.1. Penilaian latihan

Skor	Keterangan	Predikat
95 - 100	Sangat baik	A
85 - 94	Baik	B
70 - 84	Cukup	C
51 - 69	Kurang	D
≤50	Sangat kurang	E

Apabila peserta mencapai tingkat penguasaan Baik (B) sampai dengan Sangat Baik (A), peserta dapat dinyatakan berhasil, selanjutnya peserta dapat meneruskan mempelajari modul berikutnya. Tetapi apabila tingkat penguasaan peserta masih di bawah Baik, peserta harus mengulangi materi pada modul ini, terutama bagian yang belum peserta kuasai.

C. Refleksi dan Tindak Lanjut

Tabel 3.2. Refleksi dan tindak lanjut

Tujuan Pembelajaran	Tercapai	Belum Tercapai	Keterangan
1. Peserta mampu menjelaskan dan menganalisis pengertian bencana, ragam bencana dan jenis ancaman			
2. Peserta mampu menunjukkan hasil analisis tahapan dan kegiatan penyelenggaraan PB Indonesia			
3. Peserta mampu menunjukkan hasil analisis komitmen-komitmen PRB global			
Tindak lanjut			

Kegiatan yang membuat saya belajar lebih efektif

Kegiatan yang membuat saya tidak efektif belajar dan saran perbaikan

D. Kunci Jawaban

Nomer Pertanyaan	Jawaban
1	B
2	D
3	A
4	B
5	C
6	B

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2007, Undang Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

Anonim, 2014, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Anonim, 2016, Undang Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Parisagreement To The United Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

United Nations Framework Convention on Climate Change. List List of Annex I Parties to the Convention. Diakses pada 09 Juni 2018, dari http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php

Anonim, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Anonim, BNPB, 2015, Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030

TIM PENYUSUN



Eko Teguh Paripurno, di kalangan kawan-kawan aktivis lebih akrab dipanggil “Kang ET”. Pria ini semula dikenal sebagai aktivis lingkungan, melalui organisasi Komunitas Pencita Alam Pemerhati Lingkungan (KAPPALA) Indonesia yang didirikannya. Menyelesaikan doktor di Universitas Padjadjaran Bandung, dengan judul disertasi “Kajian Karakter Lahar G. Merapi sebagai Respon Perbedaan Jenis Erupsi dari Holosen sampai Resen”. Penerima Sasakawa Award dari UNISDR atas usaha-usaha dalam pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat ini, sehari-hari mengajar di Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta. Saat ini mempunyai mandat sebagai Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) dan Ketua Program Magister Manajemen (MMB) di universitas yang sama, serta sebagai Presidium Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI). Pria ini aktif sebagai konsultan manajemen bencana di berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta konsultan probono bagi komunitas berisiko bencana ekologis.



Sigit Purwanto, kelahiran Yogyakarta 26 Juli 1968, sekarang tinggal bersama seorang istri dan tiga anak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menyelesaikan studi bidang teknik lingkungan tahun 1996 dilanjutkan dengan menulis laporan kegiatan alam bebas. Mulai menjadi aktif di Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Yogyakarta sejak 2005 hingga sekarang. Pengalaman berkegiatannya telah banyak dituangkan dan dikontribusikan dalam banyak buku, modul, dan panduan tentang Pengkajian Risiko Bencana, Penyusunan Rencana Kontinjensi, Pengkayaan Teknik Fasilitasi dan *Participatory Rural Appraisal*.



Sumino, pria ini sehari-hari aktif sebagai praktisi lingkungan dan pengurangan risiko bencana ini lahir di Sukoharjo, 20 Januari 1972. Sejak tahun 1998 mulai aktif melakukan pendampingan masyarakat untuk pengelolaan lingkungan, pangan, dan energi terutama mengembangkan teknologi tepat guna ditingkat masyarakat. Mulai belajar bersama masyarakat untuk melakukan pengurangan risiko bencana sejak bergabung dengan Lembaga Pengembangan Tehnologi Pedesaan (LPTP) tahun 1999 sampai sekarang. Sejak tahun 2010 mendapatkan mandat dari LPTP sebagai program direktur. Lelaki ini juga aktif di jejaring, yaitu Steering Committee JKGEI (Jaringan Kerja Gender dan Energi Indonesia) 2009-2013, Badan Pengurus di Jaringan Kerja Pertanian Organik/Jaker-PO hingga 2016. Ia juga aktif dalam penyusunan-penyusunan dokumen kebijakan baik di tingkat daerah.



Indra Baskoro Adi. Pria kelahiran Trenggalek ,Jawa Timur ini lulusan S1 Psikologi dari Universitas Wisnuwardhana Malang, Jawa Timur. Semenjak tahun 2007 dalam keseharian aktif di Pusat Studi Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta (PSMB-UPN). Sekarang pria yang sering disapa Indra ini menetap tinggal di Lereng Merapi tepatnya RT 03/02 Dusun Turgo,Purwobinangun,Pakem. Kerja-kerja dan praktik baik Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas didapatkan melalui proses panjang kurang-lebih selama 10 tahun. Selain aktif di PSMB-UPN, ia juga aktif di Perkumpulan Kappala Indonesia, sebagai pendamping masyarakat dan praktisi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat. Pengalaman-pengalamannya antara lain adalah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas desa melalui program Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB) dan memfasilitasi program-program Sekolah Siaga Bencana di kawasan Merapi, menjadi Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi 2010, menjadi Supervisor Disaster Risk Reduction di Jayapura, dan aktif menjadi Trainer PRBBK dalam Pembekalan Fasilitator Desa Tangguh Bencana BNPB 2015 dan 2016. Email: baskoroindra83@gmail.com / kontak : 085-742-418-528



Wahyu Heniwati. Berawal dari pemberdayaan usaha mikro kecil berbasis kelompok perempuan dan kawasan sejak 2005 melalui Daya Annisa, perempuan yang akrab dipanggil Heny ini menilai bahwa salah kunci ketangguhan masyarakat antara lain peningkatan *lifeskill* dan kebijakan yang berkeadilan. Aktif dalam kegiatan organisasi sejak mahasiswa hingga sekarang menggeluti isu ekonomi pedesaan dan kebencanaan khususnya terkait dengan penghidupan berkelanjutan. Melalui Daya Annisa, lembaga yang dipimpinnya telah melakukan kemitraan program CBDRM terintegrasi dengan *livelihood* dengan berbagai mitra, antara lain GTz/GIZ, AIFDR-Ausaid, UNDP-SCDRR, RHK, Caritas Swizrtland, ASB dan BPBD Kab.Cilacap untuk Replikasi Destana. Lulusan MM UII Yogyakarta ini selain menjadi anggota pengurus di MDMC, juga di Dewan Pimpinan Nasional Assosiasi Bussiness Development Services Indonesia (ABDSI) periode 2015-2019. Telah menyusun Modul Pembelajaran atas Refleksi pengalaman pendampingan Perempuan Usaha Mikro. Menjadi trainer pembekalan Fasilitator Destana BNPB tahun 2015 dan tahun 2016. Dapat berkorespondensi melalui email: heniwati97@gmail.com.



Arnice Agustina Ajawaila. Wanita kelahiran 5 Agustus 1980 yang selama ini beraktivitas di Lembaga YAKKUM Emergency Unit Yogyakarta dan sebagai Koordinator Respon Emergency. Aktif dalam pendampingan PRBBK sejak tahun 2007 hingga sekarang. Dimulai di Nabire (2007), lalu berlanjut di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara (2007-2009), Padang Pariaman dan Mentawai (2009-2011), Kabupaten Teluk Wondama (2011-2012), Kabupaten Aceh Tengah (2014-2015), Kabupaten Manokwari Papua Barat (2015), sampai saat ini menjadi fasilitator YEU untuk Pengurangan Risiko Bencana. Untuk korespondensi dapat menghubungi lewat email : arniceajawaila@gmail.com atau nomor kontak : 0813-2971-4339



Henricus Hari Wantoro. Sejak 2001 hingga sekarang, pria kelahiran Kulon Progo ini menekuni bidang pemberdayaan masyarakat. Kerja-kerja tersebut telah dilakukan sejak 2005 di beberapa wilayah Indonesia, antara lain di Aceh, Nias, Pacitan, Magelang, Yogyakarta, dan sebagainya. Ia juga aktif dan terlibat dalam kerja-kerja penelitian, evaluasi program, pelatihan dan pendampingan. Saat ini, lulusan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ini bekerja di Desa Lestari, lembaga yang mengembangkan praktik pemberdayaan dan penghidupan masyarakat berkelanjutan, serta pengembangan usaha desa. Korespondensi dapat melalui email: hhariwantoro.indonesia@gmail.com atau kontak di 081-125-111-75.



Anggoro Budi Prasetyo. Laki-laki ini lahir di Magelang pada tahun 1978, dan telah banyak beraktivitas dalam pengorganisasian masyarakat sejak tahun 2005. Sebelumnya banyak terlibat dalam penelitian di almaternya UGM dan juga lulusan Magister Manajemen Bencana UGM ini mulai berkecimpung di dunia kebencanaan pasca Gempa Bumi DIY-Jateng Tahun 2006. Pernah menjabat sebagai Koordinator pengorganisasian masyarakat, Koordinator Gender Working Group Yogyakarta, dan juga sebagai Presidium Forum Suara Korban Bencana serta saat ini menjadi Direktur di lembaga yang terkait dengan isu gender dan kebencanaan. Selain itu juga menjadi anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY serta terlibat menjadi trainer dalam Pembekalan Fasilitator Desa Tangguh Bencana BNPB sejak 2016 dan Fasilitator Kota Tangguh BNPB sejak tahun 2015. Ia tertarik pada bidang kajian *cultural studies*, Gender dan Manajemen Bencana, serta Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk korespondensi dapat menghubungi lewat email: angieprast@gmail.com



Yugasmono. Lahir di Yogyakarta, saat ini ia bekerja sebagai staf program di Perkumpulan Lingkar. Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini aktif dalam kerja-kerja pengorganisasian masyarakat sejak mahasiswa dengan tergabung sebagai relawan di Klub Indonesia Hijau 09 Yogyakarta (KIH-09) pada tahun 2000. Kerja-kerja dan praktik pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) maupun berbasis sekolah (PRBBS), dilakukan sejak tahun 2008. Saat ini, ia juga menjadi relawan aktif di Forum PRB DIY dan Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL), dan tergabung dalam *associate facilitator* di Pujiono Centre, serta terlibat menjadi trainer dalam Pembekalan Fasilitator Desa Tangguh Bencana BNPB sejak 2015.

Penyumbang pikiran dan tulisan:

Anggraini Puspitasari – Perkumpulan Lingkar
Aris Susanto – Perkumpulan Lingkar
Arnice Adjawaila – Yakkum Emergency Unit
Banu Subagyo – Circle Indonesia
Beni Usdianto – Circle Indonesia
Fajar Nugroho – Perkumpulan Lingkar
Frans Toegimin – FPRB DIY
F. Asisi Widanto – Pujiono Centre
Heniasih – Perkumpulan Paluma Nusantara
Henricus Hari Wantoro – Desa Lestari
Indra Baskoro Adi – PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta
Johan D.B. Santosa – Perkumpulan Lingkar
Juli E. Nugroho – FPRB Jawa Tengah
Maskuri – YP2SU
Ninil RM Jannah – Perkumpulan Lingkar
Norma Sari – YP2SU
Panggali Joko Susetyo – Perkumpulan Lingkar
Pudji Santosa – Perkumpulan Lingkar
Rahmat Subiyakto – Perkumpulan Lingkar
Riana WL – Daya Annisa
Ruhui Eka Setiawan – Perkumpulan Lingkar
Sigit Purwanto – PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta
Saptono Tanjung – DAMAR
Sigit Sugiarto – Perkumpulan Kappala
Sigit Widdiyanto – Perkumpulan Kappala
Siti Mulyani – Perkumpulan Paluma Nusantara
Slamet Tri Usaha – Perkumpulan Lingkar
Sutrisno – Perkumpulan Kappala
Sumino – LPTP Solo
Umi Azizah – Perkumpulan Paluma Nusantara
Untung Tri Winarso _ Perkumpulan Lingkar
Wahyu Heniwati – Daya Annisa
Wana Kristanto – Perkumpulan Kappala
Wawan Andriyanto – YP2SU
Widanarti – Daya Annisa
Yugyasmono – Perkumpulan Lingkar

EVALUASI DARI PENGGUNA

Penyusun buku Panduan untuk Fasilitator ini menyadari benar bahwa cara-cara, materi dan alat-alat peraga yang digunakan oleh para Pendamping Masyarakat untuk memandu proses diskusi warga hingga menghasilkan dokumen-dokumen yang diinginkan dan benar-benar bermanfaat sangatlah beragam. Adalah penting juga untuk memandu diskusi warga dengan berorientasi pada cara-cara yang memudahkan agar warga masyarakat dapat i) memahami pengetahuan dan persoalan yang dibahas, ii) memicu keingintahuannya untuk menanyakan hal-hal penting bagi masyarakat dan desanya, iii) merasa bebas dan nyaman terlibat untuk berpendapat dan memberikan sumbangsih dalam bentuk apa pun, serta iv) mempunyai rasa memiliki terhadap proses dan hasil kerja mereka.

Demikian halnya pendekatan yang ditawarkan dalam buku Panduan edisi ini pun disadari masih mempunyai banyak kekurangan. Karenanya saran dan masukan dari para pengguna buku Panduan ini sangat diharapkan untuk tujuan meningkatkan kemanfaatan dan kemudahan pemakaian buku ini.

Tuliskan saran dan masukan anda di bawah. Anda dapat memberi masukan pada setiap Panduan. Kirimkan masukan anda ke alamat email spipung@gmail.com atau baskoroindra83@gmail.com.

SARAN DAN MASUKAN

Modul No: Judul:

Tuliskan saran dan masukan anda secara spesifik yang berkaitan dengan:

1. Isi materi bahasan

.....

.....

.....

2. Alat bantu: tabel,

daftar pertanyaan,

skema, dll.

.....

.....

.....

3. Metode / teknik

melaksanaannya

.....

.....

.....

4. Apa saja yang
menjadi kesulitan anda
selama memfasilitasi
kegiatan ini?
.....
.....
.....

5. Bila anda mempunyai contoh-contoh lain, mohon dilampirkan.

Terima kasih.

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

